

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat perundang-undangan yang dituangkan dalam pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penjabaran ketentuan ini secara teknis masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian rangkuman aturan tersebut secara substansial menyebutkan bahwa LKPJ merupakan *progress report* atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar, mengacu pada seluruh rangkaian dokumen perencanaan diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar maupun penetapan kebijakan lainnya terkait anggaran yang merupakan kebijakan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Terkait hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2016 dengan tema “Memantapkan Sektor Perikanan dan Pariwisata Bagi Peningkatan Daya Saing Daerah”.

B. Dasar Hukum

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana tersebut di atas, maka dokumen LKPJ Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19.a Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 53).

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Selayar secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Sejak Tahun 2008, Kabupaten Selayar berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis terletak pada 5°42'-7°35' Lintang Selatan dan 120°15'-122°30' Bujur Timur, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dan satu-satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya terpisah dari Pulau Sulawesi. Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;

- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki wilayah seluas 10.503,69 km², yang terdiri dari wilayah darat seluas 1357,03 km² (sekitar 12,91%) dan wilayah laut 9.146,66 km² (sekitar 87,08%). Di dalam wilayah seluas itu terdapat 130 pulau, yang membentuk garis pantai sepanjang 6.440,89 km². Dari gugusan pulau-pulau yang ada, telah diketahui 34 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Secara administratif, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi ke dalam 11 kecamatan (Bappeda KKS, 2009). Pada Tabel 1.a terlihat persebaran luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.a
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	2	3
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,80
4	Taka Bonerate	49,30
5	Pasimasunggu Timur	67,14
6	Bontosikuyu	248,16
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Buki	68,14
11	Bontomatene	193,23

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2016

2. Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Kabupaten Kepulauan Selayar dihuni oleh 5 etnis, yaitu Selayar/Makasar, Bajo, Bugis, Bonerate, dan Buton. Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 berjumlah 130.199 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.414 orang. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, yang tercermin dari

angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Pada tahun 2015, jumlah penduduk perempuan sebesar 67.609 orang dan laki-laki sebanyak 62.590 orang. Rasio jenis kelamin sekitar 92,58%.

Tabel 1.b
Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dirinci menurut Kecamatan
Tahun 2013-2015

KECAMATAN	2013	2014	2015
1	2	3	4
Pasimarannu	9.141	9.184	9.217
Pasilambena	7.164	7.279	7.388
Pasimasunggu	7.987	8.090	8.192
Taka Bonerate	12.922	13.112	13.293
Pasimasunggu Timur	7.429	7.455	7.478
Bontosikuyu	14.754	14.783	14.978
Bontoharu	12.959	13.093	13.226
Benteng	23.206	23.811	24.414
Bontomanai	12.514	12.589	12.654
Buki	6.277	6.317	6.353
Bontomatene	12.867	12.941	13.006
JUMLAH	127.220	128.744	130.199

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2016

b. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 adalah 62.369 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,9% adalah pengangguran terbuka yakni penduduk yang sedang mencari pekerjaan secara aktif maupun mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha. Tinggi rendahnya pengangguran terbuka memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah tinggi rendahnya kompetensi tenaga kerja yang berakibat pada tinggi-rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun melalui pendidikan formal.

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 29.843 orang dengan rincian 7.015 masih berstatus bersekolah, 18.363 mengurus rumah tangga, dan 4.465 lainnya, dengan tingkat pengangguran sekitar 0,9% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sekitar 67.64%.

Sedangkan menurut pembagian lapangan pekerjaan utama, sekitar 44,6% bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan dan 10,13% bekerja di sektor industri Pengolahan.

3. Kondisi Sosial

a. Status Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur tingkat Perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi shortfall merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.

Hasil yang diperoleh, pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 62,53. Kinerja Pembangunan Manusia tersebut pada tahun 2014 indeksinya mencapai 63,66, kemudian pada tahun 2015 nilainya menjadi 64,32. Selama periode tahun 2010 hingga 2015, angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,565 (reduksi shortfall). Fakta ini memberikan petunjuk bahwa kinerja pembangunan manusia di Kepulauan Selayar meningkat. Namun selama periode tahun 2010 hingga 2015, angka IPM Kepulauan Selayar berada di bawah angka Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Pendidikan

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kor. Maret 2015, Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 95,68%, demikian halnya Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APK 115,02.

Menurut Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kementerian Agama, pada tahun 2015 terdapat 136 Taman Kanak-kanak (TK), 22 Raudatul Atfhal, 140 Sekolah Dasar, 14 Madrasah

Ibtidaiyah, 53 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 12 Madrasah Tsanawiyah, 10 Sekolah Menengah Atas (SMA), 7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan satu Madrasah Aliyah (MA). Dari keseluruhan sekolah tersebut, memiliki persentase 100% pada persentase kelulusan kecuali pada jenjang SMP yang memiliki persentase kelulusan sekitar 98,43%. (*Sumber: Selayar dalam Angka 2016, BPS*)

c. Kesehatan

Pada tahun 2015 terdapat satu buah Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di Kecamatan Benteng, 14 Puskesmas, 287 Posyandu, dan 71 Polindes yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain didukung oleh fasilitas tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tenaga kesehatan, yaitu 25 tenaga medis, 141 tenaga keperawatan, 53 tenaga kebidanan, dan satu tenaga kefarmasian. Dokter yang ada sebanyak 9 dokter spesialis, 28 dokter umum, dan 9 dokter gigi.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, penyakit yang paling banyak diderita masyarakat pada tahun 2015-2016 adalah ISPA dengan 21.868 penderita, sedangkan penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit paling mematikan dengan menelan korban 8 orang. Selama lima tahun terakhir jumlah bayi dengan gizi buruk menunjukkan penurunan dengan hanya lima bayi menderita gizi buruk pada tahun 2015. Selama tahun 2015, pemerintah gencar melaksanakan Penyuluhan HIV/AIDS di tiga kecamatan, yaitu Pasimarannu, Benteng, dan Bontomanai. (*Sumber: Selayar dalam Angka 2016, BPS*)

d. Agama

Mayoritas penduduk Kepulauan Selayar beragama Islam, Selain itu terdapat penganut agama Kristen di Kecamatan Benteng dan Bontosikuyu dan juga terdapat penganut Hindu yang bermukim di Kecamatan Pasimasunggu dan Bontomanai. (*Sumber: Selayar dalam Angka 2016, BPS*)

e. Kriminalitas

Dari sisi kriminalitas, selama tahun 2015 terjadi total 461 tindak pidana dan terbanyak terjadi di Kecamatan Benteng dengan jumlah 277 tindak pidana. Dari 461 tindak pidana yang terjadi di tahun 2015, sekitar 70,5% telah dilakukan penyelesaian oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar. Selama tahun 2015, Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar terisi 103 orang, dimana 44 orang adalah narapidana dan 59 orang adalah tahanan. (*Sumber: Selayar dalam Angka 2016, BPS*)

f. Kemiskinan

Pada tahun 2015 dari 33.388 keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 3.847 keluarga, dengan klasifikasi Pra Sejahtera. Sedangkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional, pendapatan masyarakat miskin Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada angka Rp. 276.769,00,- dengan jumlah sebanyak 16.950 jiwa dan menurut data dari bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Setda), pada tahun 2015 sebanyak 9.215 Kepala Keluarga yang menerima Program Beras Miskin (Raskin). (*Sumber: Selayar dalam Angka 2016, BPS*)

4. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercapai melalui peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Terjadinya peningkatan produksi di suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu menjadi perhatian bahwa dalam pelaksanaan perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian global.

a. Potensi Daerah

1. Potensi Perikanan Laut

Potensi sumberdaya perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dapat didekati dari potensi lestari sumberdaya perikanan

Laut Flores dan Teluk Bone, serta Selat Makassar. Luas perairan Laut Flores dan Teluk Bone kurang lebih 340.000 km², dengan potensi lestari ikan pelagis kurang lebih 523.888 ton/tahun dan ikan demersal kurang lebih 61.790 ton/tahun (DPK Kepulauan Selayar, 2016). Dari hasil analisis peta dengan memperhitungkan area batasan laut dangkal untuk perikanan demersal dan area laut dalam untuk perikanan pelagis, diketahui luas kedua perairan tersebut untuk perikanan pelagis sekitar 333.000 km², sedang untuk perikanan demersal sekitar 7.000 km², sehingga diperoleh penyebaran ikan pelagis dianggap merata dengan kepadatan sekitar 0,25 ton/km², sedang perikanan demersal sekitar 10,3 ton/km².

Jenis ikan pelagis besar yang ditangkap di perairan Selayar adalah Ikan Madidihang (Tuna Ekor Kuning), Ikan Cakalang, dan Ikan Layang. Menurut Uktolseja (1998), besarnya potensi lestari untuk Ikan Cakalang sebesar 28.449 ton/tahun, dan Ikan Madidihang sekitar 20.418 ton/tahun di Laut Flores dan Selat Makassar. Luas kedua perairan tersebut sekitar 605.800 km², sehingga penyebaran Ikan Madidihang sekitar 0,05 ton/km² sedang Ikan Cakalang sekitar 0,03 ton/km².

Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2004) menyebutkan bahwa potensi ikan pelagis besar di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IV yaitu di Selat Makassar dan Laut Flores sebesar 193,60 (103 ton/tahun) dan produksinya sebesar 85,10 (103 ton/tahun), dengan tingkat pemanfaatan sebesar 43,96%. Produksi ikan laut berdasarkan kecamatan yang ada Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.c
Produksi Perikanan per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (ton) 2016
1	Pasimarannu	2.248,80
2	Pasilambena	4.521,00
3	Pasimasunggu	1.716,10
4	Takabonerate	5.148,10
5	Pasimasunggu Timur	1.035,00
6	Bontosikuyu	3.189,30
7	Bontoharu	2.751,10
8	Benteng	232,50
9	Bontomanai	1.004,60
10	Buki	593,20
10	Bontomatene	1.716,10

Sumber : DKP KKS, 2016

2. Potensi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Potensi perikanan air payau meliputi budidaya tambak dengan potensi 611,25 Ha untuk jenis budidaya udang, bandeng, kepiting bakau, dan rumput laut. Pola pengelolaan pertambakan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih bersifat tradisional, sehingga hasil yang diharapkan belum optimal dengan rata-rata produksi pertahun perhektar hanya sekitar 300 kg, dengan perincian udang windu 42,81 ton, udang paname 91,33 ton, dan bandeng 86,9 ton. Rendahnya produktifitas lahan akibat pengelolaan tambak masih sangat tradisional dan banyaknya tambak yang rusak akibat banjir dan pasang air laut. Data pada tahun 2013, luas areal pertambakan di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 776,65 ha dan pada tahun 2014 luas areal pertambakan menurun menjadi 611,25 ha. Ini berarti terjadi penurunan lahan seluas 238,05 ha. Penurunan areal produksi pertambakan berpengaruh negatif terhadap pendapatan masyarakat.

Selain budidaya tambak, usaha lainnya yang telah dijalankan oleh masyarakat adalah budidaya keramba. Pada tahun 2014, luas area budidaya keramba tercatat 4.864 m². Usaha keramba banyak

dijalankan oleh nelayan di Desa Bontolebang dan Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu.

Sementara itu, pengembangan budidaya rumput laut telah dikembangkan oleh masyarakat, utamanya yang bermukim di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu, Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu, Desa Lantibongang Kecamatan Bontosikuyu, dan Desa Bongayya Kecamatan Bontomatene.

3. Potensi Wisata

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi andalan untuk sektor pariwisata. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 cluster destinasi pariwisata yaitu Tana Toraja sebagai destinasi pariwisata seni dan budaya dan Kepulauan Selayar sebagai pusat pengembangan destinasi pariwisata bahari. Pada tahun 2015, persentase objek pariwisata yang dikelola dengan baik adalah sebesar 25% dari seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan data dari Kepulauan Selayar dalam angka 2015, objek wisata yang ada di Kepulauan Selayar sebanyak 114 objek wisata yang tersebar dalam 11 kecamatan. Artinya terdapat sekitar 28 objek wisata yang dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu objek wisata yang menjadi ikon dari Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Taman Nasional Taka Bonerate.

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan atol (pulau karang di tengah laut) ketiga terbesar di dunia, setelah atol Kwajelein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Maldives. Takabonerate secara geografis terletak di Laut Flores, berada pada 120°55"-121°25" BT dan 6°20"-7°10" LS. Atol Takabonerate telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Takabonerate berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/KptsII/1992, tanggal 26 Februari 1992, dengan luas kawasan 530.765 ha. Secara fisik, Kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate dibatasi oleh:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores

- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda.

Pada tahun 2015, Taman Nasional Taka Bonerate telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu cagar biosfer dunia. Selain itu masih banyak lagi objek pariwisata andalan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sudah dikelola seperti Pantai Baloiya, Pantai Babaere, Pantai Ngapalohe, Pantai Liang Tarrusu, Pantai Jeneiya, Pantai Pattumbukang, Pantai Appatana, dan berbagai macam wisata alam dan Wisata Budaya seperti Gong Nekara, Meriam Kuno, Jangkar Raksasa, Mesjid Tua Gantarang, Makam Tua Silolo, Air Terjun Suttia, dan Balang Kalambu.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Berikut disajikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Distribusi Persentase PDRB menurut sektor (lapangan usaha) Atas Dasar Harga Berlaku dan

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar
Periodesasi 2012-2015.

Tabel 1.d
PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2015 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.061.392,7	1.245.736,2	1.55.411,9	1.914.540,2
2	Pertambangan dan Galian	19.078,9	23.791,9	33.332,3	40.300,4
3	Industri Pengolahan	77.392,2	87.485,4	96.843,1	108.472,9
4	Listrik dan Gas	2.806,9	2.829,9	3.063,3	2.450,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.244,4	3.452,5	4.046,7	4.204,6
6	Konstruksi	433.433,7	544.596,1	677.643,3	810.690,5
7	Perdagangan besar dan Eceran	212.122	234.962,3	263.205,5	303.299,4
8	Transportasi dan pergudangan	55.734	65.023,6	81.873,3	97.046,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.613,2	6.137,6	7.146,5	8.150,9
10	Informasi dan Komunikasi	66.959,3	75.650,7	81.067	85.964,9
11	Jasa Keuangan dan asuransi	28.920,4	35.502,1	42.398,3	50.555,8
12	Real Estate	40.041,8	45.791,7	52.903,6	60.015,4
13	Jasa Perusahaan	386,1	477,4	583,9	690,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	248.903,7	269.720,1	296.958,8	364.925,3
15	Jasa Pendidikan	152.108,2	28.530,3	193.238,5	214.452,6
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	45.520,5	51.184,1	58.937,3	66.690,5
17	Jasa Lainnya	11.277,7	12.828,7	14.859,9	16.891,1
	PDRB	2.464.936	2.879.790,3	3.463.518,4	4.149.341,5

Selayar dalam Angka, 2016

Berikut juga disajikan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Distribusi Persentase PDRB menurut sektor (lapangan usaha) Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2012-2015.

Tabel 1.e
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2015 (juta rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	906.778	989.261,2	1.115.059,0	1.188.576,2
2	Pertambangan dan Galian	15.975,4	17..623,9	19.894,2	22.164,5
3	Industri Pengolahan	71.142,2	76.406,8	80.529,7	85.007,2
4	Listrik dan Gas	2.935,1	3.183,6	3.512,2	3.595,8

NO	LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.058,5	3.128,5	3.535,4	3.567,7
6	Konstruksi	349.433,6	396.697,4	430.618,9	473.435,3
7	Perdagangan besar dan Eceran	188.800,4	203.424,3	221.138,4	237.863,6
8	Transportasi dan pergudangan	48.198,2	52.394,1	58.319,7	62.604,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.107,4	5.422,8	5.691,2	5.975,5
10	Informasi dan Komunikasi	64.480	71.893,3	76.779,1	84.881,3
11	Jasa Keuangan dan asuransi	24.495,4	28.099,5	28.798,4	31.674,1
12	Real Estate	36.496,1	39.683,6	43.064,3	46.445,0
13	Jasa Perusahaan	330,6	378,6	426,1	451,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	217.814,5	229.423	233.983,3	255.464,4
15	Jasa Pendidikan	136.995,3	146.810,2	151.635,4	160.736,3
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	40.454,5	43.046,1	45.991,2	48.963,2
17	Jasa Lainnya	10.334,7	10.913,6	11.671,3	12.428,9
	PDRB	2.122.811,8	2.317.790,7	2.530.650,8	2.723.814,5

Selayar dalam Angka, 2016.

Berdasarkan hasil PDRB tahun 2014. Nilai PDRB atas dasar harga Konstan Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 2.530.650,8 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011, nilainya sebesar 1.967.829 juta rupiah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, selain itu juga merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi ini cukup optimis dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten berhasil merangkul sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non pemerintah sehingga semua program kegiatan serta proyek-proyek pemerintah bisa terlaksana. Berikut disajikan tabel perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 1.f
Perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
Selama 2012-2015

NO	PERIODE	PDRB		PERTUMBUHAN EKONOMI
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN 2010	
1	2012	2.464.936,0	2.122.811,8	7,88
2	2013	2.880.860,4	2.296.374,9	8,18
3	2014	3.494.213,2	2.503.220,2	9,01
4	2015	4.149.341,5	2.723.814,5	8,81

Sumber: Selayar Dalam Angka, 2016

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,88%, tahun 2013 sebesar 8,18%, tahun 2014 sebesar 9,01%, dan pada tahun 2015 menurun jadi sebesar 8,81%.

3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.920.395,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Berikut disajikan tabel PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2012-2015 :

Tabel 1.g
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2012-2015

NO	PERIODE	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
1	2	3	4
PDRB PERKAPITA			
1	2012	19.790.258	17.043.442
2	2013	22.644.713	18.050.424
3	2014	27.140.785	19.443.393
4	2015	31.869.227	20.920.395

Sumber: Selayar Dalam Angka, 2016